

PENGARUH IPM, BIAYA INFRASTRUKTUR, INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI BALI

Diah Pradnyadewi T¹

Ida Bagus Putu Purbadharmaja²

1,2

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

e-mail: diahpradnya85@yahoo.co.id/ telp: +6281 238 597 212

ABSTRAK

Beberapa penyebab dari adanya ketimpangan suatu daerah adalah ketidakmerataan IPM, biaya infrastruktur dan investasi serta dapat juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan secara langsung maupun tidak langsung IPM, biaya infrastruktur serta investasi pada ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2008 – 2015. Observasi non partisipan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dan analisis jalur sebagai teknik analisisnya. Penelitian ini memiliki hasil yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. IPM dan investasi tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening yang mempengaruhi IPM dan biaya infrastruktur secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Kata Kunci: *ketimpangan distribusi pendapatan, IPM, biaya infrastruktur, investasi, pertumbuhan ekonomi*

ABSTRACT

Unequal distribution of income can be caused by several factors, including uneven amount of quality human resources, infrastructure costs and investment in an area. This research has a purpose to analyze directly effect and indirectly effect of HDI, infrastructure costs and the investment of the unequal distribution of income through economic growth in the district/city in Bali. This research uses secondary data from 2008 – 2015. The method used in this research is a non-participant observation data collection and in this research used path analysis. In this research found that HDI has directly and significant impact on economic growth. Infrastructure costs and economic growth have directly and significant effect on the unequal distribution of income. Meanwhile, HDI and investment have not significant effect on inequality of income distribution. Economic growth is a variable intervening the indirect influence of the HDI and infrastructure costs of the unequal distribution of income.

Key Word: *inequality of income distribution, HDI, infrastructure costs, investment, economic growth*

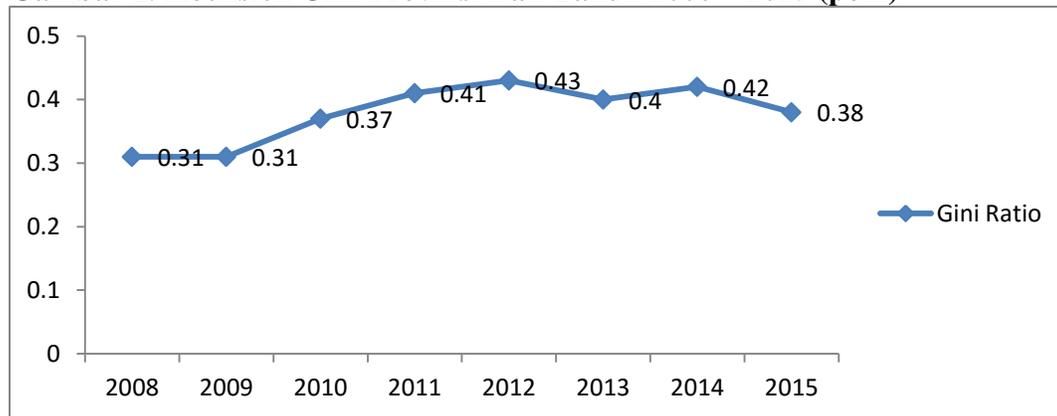
PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan dapat terjadi antar individu, sektor maupun daerah. Ketimpangan pendapatan di setiap daerah disebabkan perbedaan komposisi jumlah penduduk, sumber daya yang ada dan karakteristik setiap daerah (Amrillah, 2013). Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan antar masyarakat maupun daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Kesenjangan antar daerah telah menjadi fokus utama dalam kebijakan dan kepentingan pemerintah maupun masyarakat, terutama Indonesia yang merupakan negara dengan masyarakat majemuk dimana kondisi geografis mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu daerah (Irawan, 2015). Kesenjangan ekonomi regional dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan dan migrasi modal antara daerah depresi dan daerah sejahtera serta memburuknya perdagangan agregat (Rowan dan Thirlwall, 2013). Adanya ketimpangan dalam suatu daerah akan mendorong daerah yang tertinggal untuk mengembangkan perekonomian di daerahnya agar tidak terdapat jurang yang besar dengan daerah maju. Tingkat ketimpangan antar daerah dalam hal pembaguan ekonomi dan sosial merupakan suatu proses pertumbuhan di semua negara tanpa bisa mengidentifikasi dengan model pembangunan yang satu atau lainnya (Antonescu, 2010). Ketimpangan distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas antar daerah. Ketimpangan distribusi antar daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan geografis, perbedaan sumber daya manusia, faktor produktivitas serta strategi pembangunan daerah (Ali, 2013). Kesenjangan antar daerah akan semakin besar perbedaannya akibat perbedaan geografis seperti halnya ketimpangan antara daerah perkotaan dengan pedesaan (Breau dan Saillant, 2016). Menurut Syafrizal (dalam Fitriyah dan Rachmawati, 2012) menjelaskan bahwa

ketimpangan merupakan masalah umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Disparitas antar daerah semakin diperparah akibat tidak efisiennya pemerataan daerah seperti mobilitas tenaga kerja, upah dan investasi (Piotr, 2009). Ketimpangan dapat memberikan dampak positif, yaitu daerah akan saling bersaing untuk meningkatkan perekonomiannya. Akan tetapi ketimpangan dapat pula berdampak negatif seperti ekonomi yang tidak efisien, stabilitas sosial dan solidaritas yang lemah, serta ketimpangan yang tinggi (Todaro dan Smith, 2004). Todaro dan Smith juga menjelaskan bahwa untuk menganalisis ketimpangan dapat diukur dengan menggunakan Gini Rasio dimana angkanya berkisar antara 0-1 yang digunakan sebagai ukuran ketimpangan agregat suatu wilayah.

Melihat ketimpangan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2008 – 2015 seperti yang digambarkan pada gambar 1, maka kita akan dapat melihat lonjakan pada gini rasio terjadi pada masa dimana guncangan ekonomi melanda Bali. Setelah 2010 tingkat ketimpangan meningkat menjadi jauh diatas sebelumnya. Gini rasio telah beranjak naik dari sebelumnya yang hanya 0,31 menjadi 0,37. Kenaikan ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam paradigma ketimpangan ekonomi penduduk di Bali. Ketimpangan ini tidak lagi dianggap ketimpangan rendah namun mulai beranjak menapaki posisi sebagai yang menengah. Di tahun sesudahnya yaitu tahun 2011 Koefisien Gini bahkan mencapai level diatas angka 0,4. Posisi yang tetap bertahan dalam fluktuasi hingga tahun 2014 dimana angka koefisien gini mencapai 0,42. Angka ini jauh lebih besar daripada tahun 2013 yang hanya sekitar 0,40. Tahun 2015 koefisien gini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 0,38.

Gambar 1. Koefisien Gini Provinsi Bali Tahun 2008 – 2015 (poin)



Sumber : Bappeda Provinsi Bali Tahun 2008 – 2015

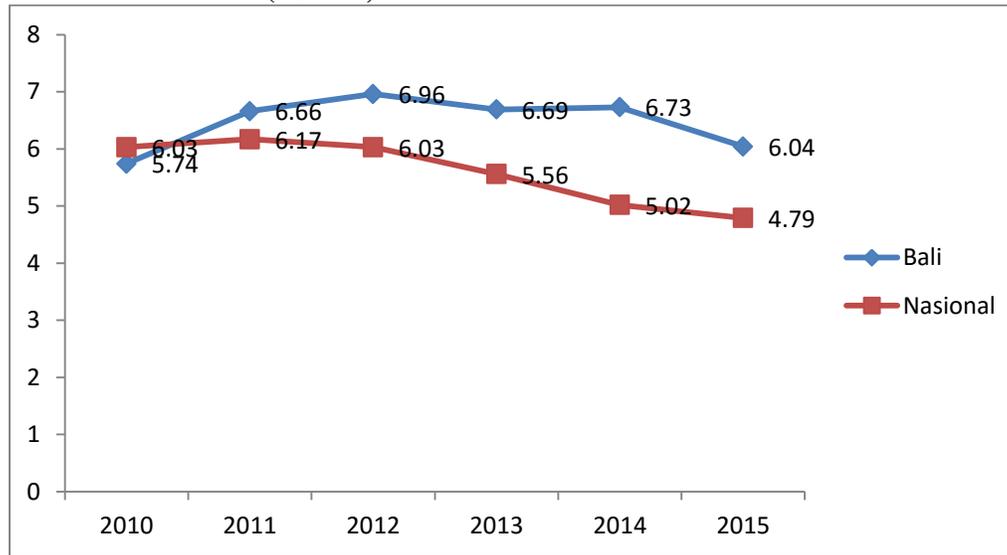
Gini rasio masing-masing daerah di Provinsi Bali tahun 2008 – 2015 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan gini rasio Provinsi Bali. Ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali hampir tergolong ketimpangan menengah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini mengandung tiga hal pokok yaitu proses, yaitu output perkapita jangka panjang (Cahyani, 2016). Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang, karena merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah (Barimbing, 2015). Dalam suatu perekonomian kita tidak hanya sekedar membahas mengenai pentingnya PDB dan lapangan pekerjaan, namun juga perlu memperhatikan peran yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Suryahadi, dkk, 2012). Pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk menggambarkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat juga akan menyebabkan meningkatnya angka ketimpangan pendapatan, dimana pendapatan yang tercipta cenderung mengumpul pada wilayah yang mempunyai faktor-faktor produksi lebih banyak (BPS Provinsi Bali, 2009). Indikator yang dapat digunakan untuk

melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pauzi, 2016). Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan bagi pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun atau direncanakan oleh pemerintah pusat dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah (Suwandika, 2015). Dalam penelitian yang telah dilakukan Kuznets, menyimpulkan bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, pada permulaannya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan ketimpangan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan, namun setelah tahapan yang lebih lanjut pemerataan akan semakin tercapai kemudian tingkat ketimpangan akan mengalami penurunan. Kuznets menggambarkan pola peningkatan dan penurunan tersebut dengan metode U terbalik yang ia ciptakan setelah meneliti kesenjangan diberbagai negara.

Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran distribusi pendapatan yang merata. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam jangka pendek, cepatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat pula. Pada Gambar 2, digambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2015. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2013 sebesar 5,56% dan pada tahun 2015 sebesar 4,79% sedangkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali pada tahun 2013 sebesar 6,69% dan pada tahun 2015 sebesar 6,04% meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nasional Tahun 2010-2015 (Persen)

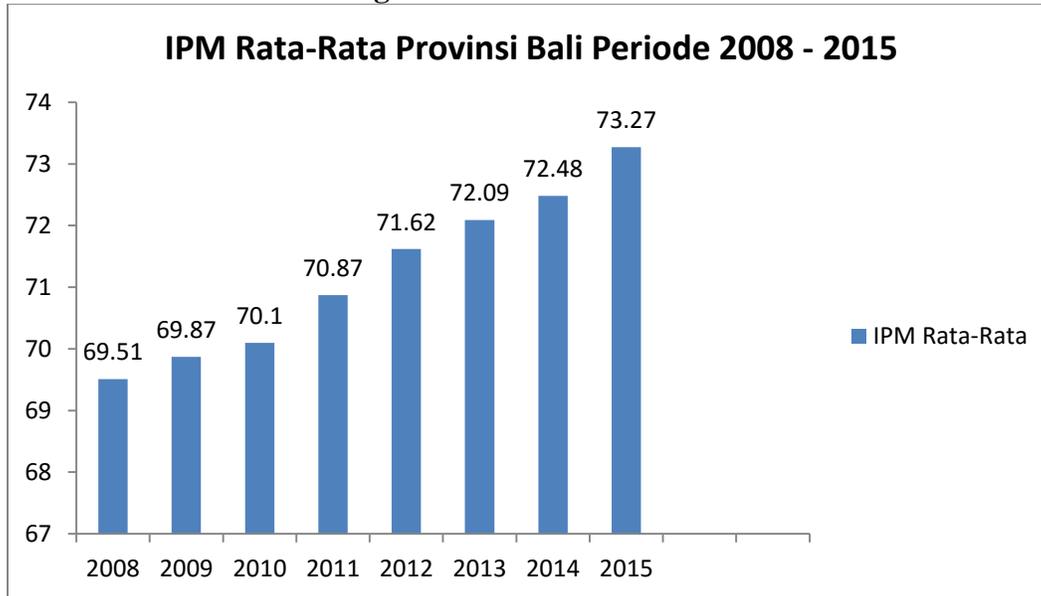


Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 -- 2015

Pembangunan dalam lingkup daerah disamping meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, juga perlu memperhatikan pembangunan manusia (Artana, 2015). Pembangunan manusia disebut-sebut sebagai tujuan akhir dari aktivitas manusia bukan tujuan dari pertumbuhan ekonomi (Poddar, dkk, 2014). Pembangunan manusia sendiri menjelaskan mengenai penghapusan kondisi-kondisi yang membatasi kemampuan dan menolak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang normal (Mahesha dan Shivalingappa, 2011). Tingkat pembangunan manusia yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tentu juga tergantung pada kondisi masyarakat lainnya (Gustav, 2004). Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/ indeks pembangunan manusia (Hariwan, 2015). Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dapat digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran derajat perkembangan manusia dalam bidang kesehatan,

pendidikan dan kesejahteraan pembangunan. Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan. IPM rata-rata Provinsi Bali digambarkan pada gambar 3, dimana setiap tahunnya angka IPM selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS tahun 2015, IPM Provinsi Bali pada tahun 2015 sebesar 73,27 meningkat 0,79 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali berada di peringkat ke-5 dan berada diatas nilai IPM nasional.

Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Periode 2008-2015 (Poin)



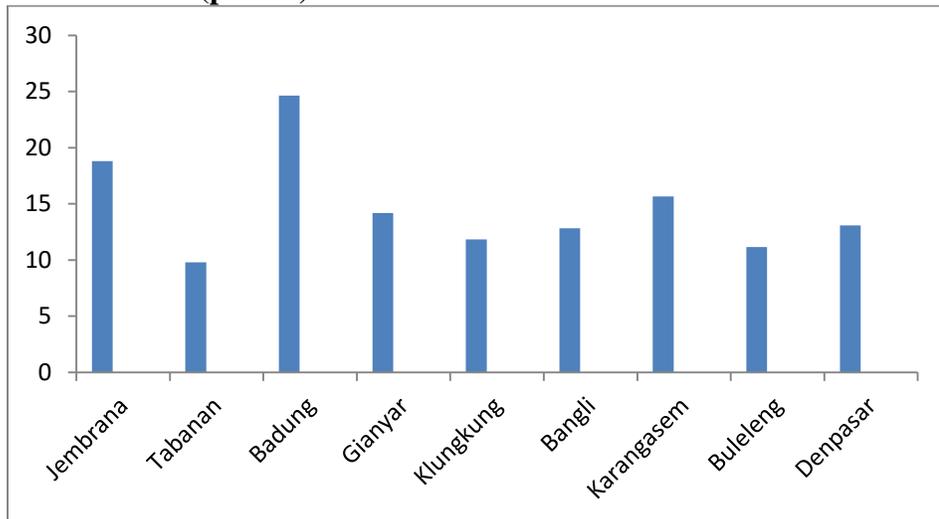
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2008 – 2015

Ketersediaan infrastruktur sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk mendorong produktivitas daerahnya dan untuk menciptakan efisiensi serta efektivitas di berbagai

sektor. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi (Sumadiasa, 2016). Salah satu cara untuk mendukung peningkatan PDRB yaitu dengan lebih meningkatkan belanja daerah dalam bidang infrastruktur. Biaya infrastruktur merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan infrastruktur suatu daerah. Faktor pendorong produktivitas suatu daerah salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi (Awandari, 2016). Tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Putri, 2014). Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengatur anggaran bidang infrastruktur dengan tepat dan benar karena ketersediaan infrastruktur merupakan faktor penunjang untuk memperlancar kegiatan ekonomi. World Bank (2001) menyatakan bahwa dari perspektif *governance*, perbaikan pelayanan publik dan pengurangan kemiskinan dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi alokasi melalui penyesuaian secara lebih baik pelayanan publik dan efisiensi produksi melalui peningkatan akuntabilitas, responsivitas. Pembiayaan infrastruktur berupa jalan, jembatan dan lain sebagainya tersebut dapat dilihat dari perbandingan pengeluaran pemerintah dengan total belanja barang publik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu daerah dapat dihasilkan melalui pembiayaan infrastruktur. Menurut Sahoo, dkk (2010)

dampak dari modal publik atau infrastruktur berbeda di setiap negara, wilayah maupun sektor tergantung pada kuantitas dan kualitas dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Semakin baik kondisi infrastruktur suatu daerah, tingkat mobilitas juga semakin baik. Menurut Sajoodi, dkk (2012), ketepatan dalam pengadaan infrastruktur dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Wilayah dengan akses terbatas mengalami tingkat harga dan kelangkaan pasokan sumber daya wilayah jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan akses lebih baik. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik akan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang berbeda pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan masyarakat daerah bersangkutan yang tercermin dalam PDRB daerah tersebut.

Gambar 4. Rata – Rata Pengeluaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Infrastruktur Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015 (persen)



Sumber : Bali Dalam Angka, 2016

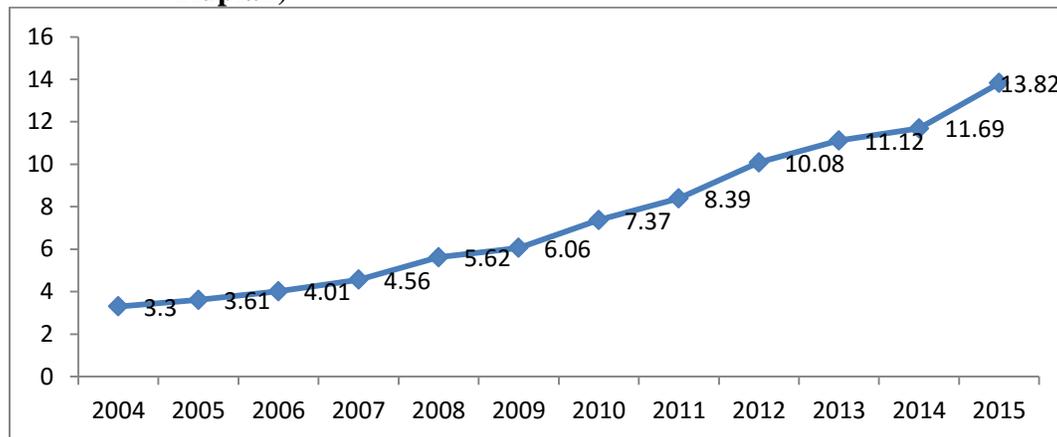
Rata-rata pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 4

Kabupaten Badung memiliki rata-rata pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur tertinggi yaitu 24,63 persen. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten Badung memungkinkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal lebih besar. Sementara itu, rata-rata pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur terendah tercatat di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 9,81 persen.

Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan menambah modal serta mendapatkan laba pada waktu tertentu. Terkonsentrasinya investasi di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Investasi menurut Mankiw (2006) adalah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Investasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, investasi pemerintah dan investasi swasta, sedangkan berdasarkan pembentukan modalnya investasi terdiri dari 2 jenis investasi yaitu: investasi bruto dan investasi neto. Investasi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga kesempatan para pencari kerja akan semakin luas dan tentunya akan mengurangi angka pengangguran. Banyak negara maju atau daerah maju yang mencapai pembangunan ekonomi dan sosialnya dengan berinvestasi dalam SDM dan teknologi (Kaur dan Singh, 2016). Salah satu penyebab menurunnya perkembangan tingkat investasi yaitu karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dan dapat berpengaruh pada keyakinan para investor sehingga mengakibatkan investasi menurun yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Paramita, 2015). Investasi dalam bentuk PMTDB dapat berupa bangunan atau konstruksi serta mesin-mesin atau alat perlengkapan lainnya. Selama delapan tahun terakhir, perkembangan investasi fisik di Bali cukup baik. Perkembangan investasi yang terlihat dari perkembangan PMTDB dalam komponen PDRB cenderung mengalami peningkatan.

Peningkatan investasi tersebut tidak terlepas dari maraknya pembangunan infrastruktur di beberapa daerah.

Gambar 5. Perkembangan PMTDB di Provinsi Bali Tahun 2004 – 2015 (Triliun Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2016

Kondisi PMTDB pada gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan relative dari tahun 2004 -- 2015. Angka PMTDB paling tinggi di tahun 2015 sebesar 13,82 triliun rupiah dan paling rendah di tahun 2004 sebesar 3,30 triliun rupiah yang memiliki arti bahwa kondisi PMTDB di Provinsi Bali selalu meningkat. Berdasarkan angka PMTDB Provinsi Bali kurun waktu 2004 – 2015 rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya. Investasi swasta masing-masing daerah di Provinsi Bali tiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana Kabupaten Badung dari tahun 2007 hingga 2015 paling banyak jumlah investasinya. Hal tersebut karena pertumbuhan beberapa sektor di Kabupaten Badung sangat maju dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Besarnya investasi yang masuk akan memberikan dorongan yang kuat pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali (Arshanti, 2015).

Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh langsung IPM, biaya infrastruktur dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Bali, bagaimanakah pengaruh langsung IPM, biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali, dan yang terakhir bagaimanakah pengaruh IPM, biaya infrastruktur dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan langsung IPM, biaya infrastruktur dan investasi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, untuk menganalisis hubungan langsung IPM, biaya infrastruktur dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali dan untuk mengetahui hubungan IPM, biaya infrastruktur dan investasi secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik itu untuk menambah dan memperkaya sumber-sumber bacaan, serta diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah Provinsi Bali mengenai kebijakan-kebijakan yang terkait pembangunan struktur ekonomi dan meningkatkan angka perekonomian.

Adapun hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini yaitu, pertama diduga IPM, biaya infrastruktur dan investasi memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kedua, diduga IPM, biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung

dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dan yang ketiga, diduga IPM, biaya infrastruktur, investasi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk kuantitatif dan bersifat asosiatif, dimana penelitian asosiatif digunakan untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel. Provinsi Bali digunakan sebagai lokasi penelitian karena angka ketimpangan distribusi di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali cukup besar serta pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali belum sepenuhnya merata.

Jenis data kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dan menggunakan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui metode pengumpulan data observasi non partisipan yang merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya melakukan observasi sebagai pengamat independen.

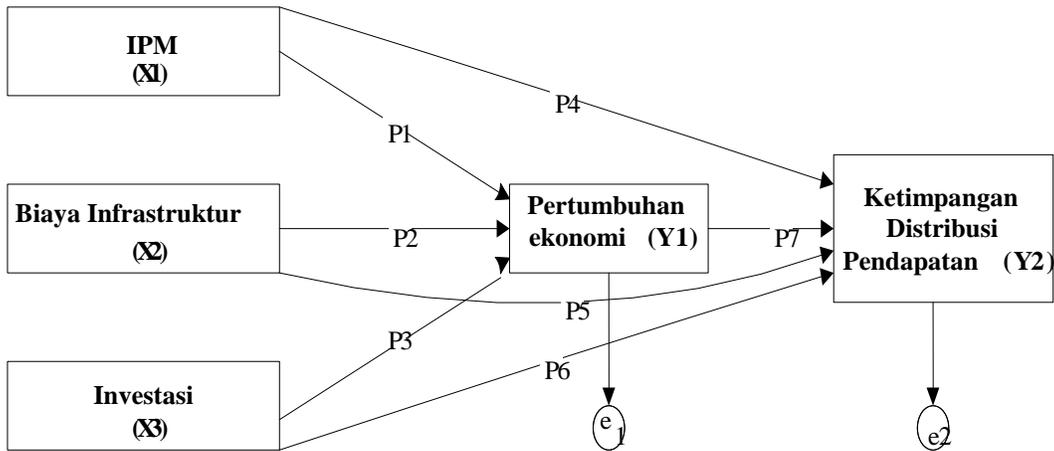
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu analisis jalur. Analisis jalur atau *path analysis* digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung variabel independent terhadap variabel dependent melalui variabel mediasi serta untuk menguji hubungan antar variabel yang diteliti dalam bentuk hubungan sebab akibat. Penelitian pengaruh IPM, biaya infrastruktur dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008 – 2015 dapat diilustrasikan seperti Gambar 6.

Berdasarkan Gambar 6 dapat dirumuskan dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan, yaitu.

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Gambar 6. Model Analisis Jalur



Keterangan :

- Y_2 = Ketimpangan Distribusi Pendapatan
- Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X_1 = IPM
- X_2 = Biaya Infrastruktur
- X_3 = Investasi
- $\beta_1 \dots \beta_3$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X
- e_1, e_2 = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui hubungan antar variabel penelitian yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural yaitu sebagai berikut:

Persamaan Struktural 1:

$$Y_1 = 0,784X_1 + 0,209X_2 - 0,181X_3 + e_1$$

Persamaan Struktural 2 :

$$Y_2 = -0,287X_1 - 0,608X_2 + 0,716X_3 + 0,542Y_1 + e_2$$

Tabel 1. Ringkasan Koefisien Jalur

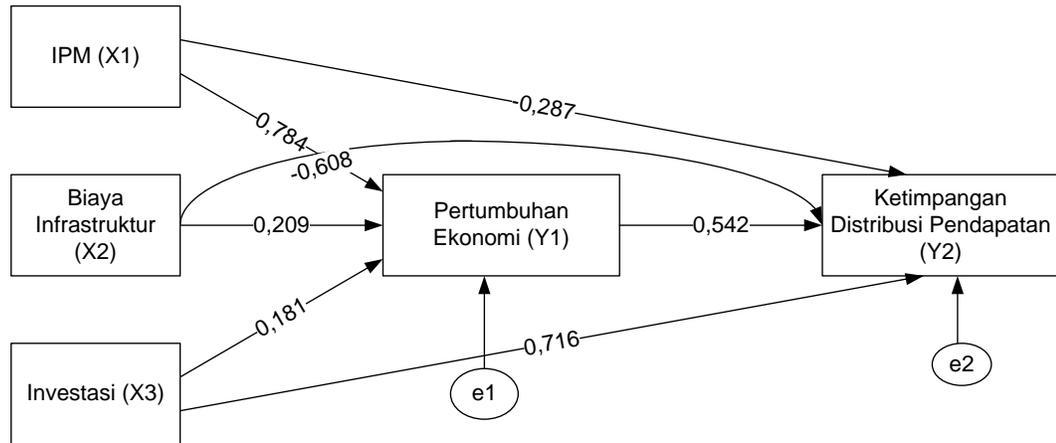
Regresi	Koef. Regresi Estándar	Stándar Eror	t hitung	p value	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,784	0,018	4,866	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,209	0,000	0,993	0,324	Tidak Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_1$	-0,181	0,000	-0,181	0,532	Tidak Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	-0,287	0,002	-1,219	0,227	Tidak Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	-0,608	0,000	-2,279	0,026	Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_2$	0,716	0,000	1,963	0,054	Tidak Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	0,542	0,013	3,551	0,001	Signifikan

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 1. menjelaskan bahwa variabel IPM (X_1) memiliki pengaruh langsung dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi (Y_1). Variabel biaya infrastruktur (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh langsung dan signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2). Sementara itu, variabel IPM (X_1) dan investasi (X_3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2)

Berdasarkan ringkasan koefisien jalur maka dapat diilustrasikan diagram analisis jalur antar variabel seperti berikut:

Gambar 7. Diagram Analisis Jalur Penelitian



Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan Gambar 7 dapat dihitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antar variabel seperti di bawah ini:

Tabel 2. Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Total Pengaruh Antar Variabel Penelitian

Variabel	X ₁			X ₂			X ₃		
	PL	PTL	TP	PL	PTL	TP	PL	PTL	TP
Y1	0,784	-	0,784	0,209	-	0,209	-0,181	-	-0,181
Y2	-0,287	0,425	0,138	-0,608	0,113	-0,494	0,716	-0,098	0,618

Sumber : Data diolah, 2016

Keterangan:

- PL = Pengaruh Langsung
- PTL = Pengaruh Tidak Langsung
- TP = Total Pengaruh
- X₁ = IPM
- X₂ = Biaya Infrastruktur
- X₃ = Investasi
- Y₁ = Pertumbuhan Ekonomi
- Y₂ = Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Untuk mengetahui nilai e₁ dan e₂ dihitung dengan rumus:

$$e_1 = \sqrt{1 - r^2} = \sqrt{1 - 0,559} = 0,664$$

$$e_2 = \sqrt{1 - r^2} = \sqrt{1 - 0,312} = 0,829$$

Untuk memeriksa validitas model dalam penelitian ini, dapat dilakukan pemeriksaan melalui koefisien determinasi total yang hasilnya sebagai berikut:

$$R^2_m = 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2 \dots \dots \dots (3)$$

$$R^2_m = 0,4495$$

Keterangan:

- R^2_m : Koefisien determinasi total
- e_1, e_2 : Nilai kekeliruan taksiran estándar

Koefisien determinasi total sebesar 0,4495 memiliki makna bahwa sebesar 44,95% IPM, biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi variasi ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model sebesar 55,05%.

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung IPM pada pertumbuhan ekonomi, diperoleh *standardized coefficient beta* yaitu sebesar 0,784 dan angka probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat dikatakan bahwa IPM memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. IPM memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. IPM di suatu daerah menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Peningkatan IPM berarti peningkatan terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat mengurangi angka pengangguran karena mudah terserap di dunia usaha sehingga pendapatannya akan bertambah. Hal tersebut dapat meningkatkan angka PDRB suatu daerah dan tentu saja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Penelitian oleh Aris dan Lucky (2012) mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung biaya infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi, diperoleh *standardized coefficient beta* yaitu sebesar 0,209 dan angka probabilitas sebesar $0,324 > 0,05$. Dapat dikatakan bahwa biaya infrastruktur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pembiayaan dalam bidang infrastruktur akan meningkatkan sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur seperti pembuatan jalan, jembatan dan lainnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hubungan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bersifat multiple dan kompleks, tidak hanya karena pengaruhnya secara langsung terhadap produksi dan konsumsi namun juga karena infrastruktur menciptakan eksternalitas langsung dan tidak langsung dan menyangkut besarnya arus pengeluaran yang menimbulkan pekerja tambahan. Komponen – komponen pembentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah alokasi pemerintah serta partisipasi dari pihak swasta, namun pada kenyataannya di Bali pertumbuhan ekonomi sebagian besar dipengaruhi oleh sektor swasta dimana pariwisata yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Bali lebih banyak mendapatkan alokasi dana dari pihak swasta. Penelitian Jimmy (2010) bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, dimana pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2008 – 2011.

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung investasi pada pertumbuhan ekonomi, diperoleh *standardized coefficient beta* yaitu sebesar -0,181 dan probabilitas sebesar $0,532 > 0,05$. Dapat dikatakan bahwa investasi

tidak memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Di Provinsi Bali data PMTDB pada tahun 2008 – 2015 selalu mengalami peningkatan namun tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan realisasi dari dana investasi tersebut belum optimal, sehingga tidak bisa mengurangi angka pengangguran maupun meningkatkan pendapatan suatu daerah, selain itu di Provinsi Bali untuk meningkatkan pertumbuhannya tidak hanya didukung oleh investasi dari pemerintah namun investasi dari sektor swasta pun sangat berperan. Kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung IPM pada ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, diperoleh *standardized coefficient beta* yaitu sebesar -0,287 dan probabilitas sebesar $0,227 > 0,05$. Dapat dikatakan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Suatu keadaan yang baik apabila suatu daerah Indeks Pembangunan Manusia meningkat maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Secara umum IPM yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relative tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah dan ada daerah yang maju akibat kualitas manusianya yang baik. Hal ini akan mendorong tidak seimbang nya pembangunan yang terjadi. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Rama dkk (2013) tentang pengaruh IPM pada ketimpangan pembangunan di Jawa Timur pada tahun 2005 – 2011.

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung biaya infrastruktur pada ketimpangan distribusi pendapatan, diperoleh *standardized*

coefficient beta sebesar -0,608 dan probabilitas sebesar $0,026 < 0,05$. Dapat dikatakan bahwa biaya infrastruktur memiliki pengaruh langsung dan signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Koefisien yang bernilai negatif berarti semakin tinggi pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur maka ketimpangan distribusi pendapatan akan berkurang. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik akan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang berbeda pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan masyarakat daerah bersangkutan yang tercermin dalam PDRB daerah tersebut. Di Provinsi Bali pembangunan akan infrastruktur sangat diperlukan guna menunjang kegiatan ekonomi khususnya di daerah – daerah yang memiliki akses terbatas seperti Kabupaten Klungkung dan Bangli, sehingga pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur memiliki pengaruh dalam menurunkan angka ketimpangan di suatu daerah. Penelitian Nungki (2011) mendukung hasil pada penelitian ini yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam bidang infrastruktur memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia.

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung investasi pada ketimpangan distribusi pendapatan, diperoleh *standardized coefficient beta* yaitu sebesar 0,716 dan probabilitas sebesar $0,054 > 0,05$. Dapat dikatakan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Di Provinsi Bali daerah – daerah yang dianggap potensial seperti Denpasar dan Badung memperoleh investasi yang sangat

tinggi dibandingkan daerah lainnya. Ketidakmerataan inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali, selain itu investasi yang tinggi di suatu daerah tidak dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali karena untuk mencapai angka disparitas yang rendah diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta. Untuk mengembangkan sektor-sektor yang ada di Provinsi Bali khususnya sektor pariwisata yang dianggap unggul, sangat diperlukannya bantuan investasi dari pihak swasta. Penelitian Wahyuni, dkk (2014) bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, dimana investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kesenjangan pendapatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2000 – 2012. Pengaruh yang positif memiliki arti yaitu investasi yang meningkat akan meningkatkan disparitas atau kesenjangan pendapatan pula.

Berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji hubungan langsung pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan distribusi pendapatan, diperoleh *standardized coefficient beta* yaitu sebesar 0,542 dan probabilitas sebesar $0,001 < 0,05$. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung dan signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang searah terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Teori yang dikemukakan oleh Kuznets mendukung hasil dalam penelitian, dimana dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi yang cepat akan mengakibatkan ketidakmerataan semakin tinggi pula, namun seiring berjalannya waktu persoalan tersebut akan teratasi. Di Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan menjadi masalah yang serius. Daerah yang pertumbuhannya lambat biasanya disebabkan oleh

beberapa faktor seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki akibat investasi yang kurang optimal serta minimnya sumber daya manusia berkualitas yang mampu menggerakkan perekonomian menjadi lebih baik. Fenomena tersebut yang mengakibatkan angka ketimpangan pendapatan di suatu daerah meningkat.

Hubungan tidak langsung IPM pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Sb_1b_7 = \sqrt{b_7^2 Sb_1^2 + b_1^2 Sb_7^2} \dots\dots\dots(4)$$

$$Sb_1b_7 = \sqrt{(0,542)^2(0,018)^2 + (0,784)^2(0,013)^2}$$

$$Sb_1b_7 = 0,0899$$

Menurut hasil perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi hubungan tidak langsung maka perlu menghitung nilai z hitung (uji t-hitung) dari koefisien Sb_1b_7 dengan rumus yaitu:

$$z = \frac{b_1b_7}{Sb_1b_7} \dots\dots\dots(5)$$

$$z = 4,726$$

Oleh karena z hitung sebesar $4,726 > 1,64$, hal ini berarti secara tidak langsung IPM berpengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali atau dapat dikatakan pula bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh IPM pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.

Besarnya hubungan tidak langsung IPM pada ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening adalah sebagai berikut:

$$X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2 = (b_1 \times b_7) \dots\dots\dots(6)$$

$$= 0,425$$

Nilai sebesar 0,425 mempunyai arti bahwa pengaruh IPM pada ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali adalah sebesar 42,5 persen.

Hubungan tidak langsung biaya infrastruktur pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Sb_2b_7 = \sqrt{b_7^2 Sb_2^2 + b_2^2 Sb_7^2} \dots\dots\dots(7)$$

$$Sb_2b_7 = \sqrt{(0,542)^2(0,000)^2 + (0,209)^2(0,013)^2}$$

$$Sb_2b_7 = 0,0027$$

Berdasarkan perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi hubungan tidak langsung maka harus menghitung nilai z hitung (uji t-hitung) dari koefisien Sb_2b_7 dengan rumus yaitu:

$$z = \frac{b_2b_7}{Sb_2b_7} \dots\dots\dots(8)$$

$$z = 41,955$$

Oleh karena z hitung sebesar $41,955 > 1,64$, hal ini berarti biaya infrastruktur secara tidak langsung memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali atau dapat dikatakan pula bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh biaya infrastruktur pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali.

Besarnya hubungan biaya infrastruktur terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening adalah sebagai berikut:

$$X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2 = (b_2 \times b_7) \dots \dots \dots (9)$$

$$= 0,113$$

Nilai sebesar 0,113 memiliki arti bahwa hubungan biaya infrastruktur pada ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali sebagai variabel intervening adalah sebesar 11,3 persen.

Hubungan tidak langsung investasi pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Sb_3b_7 = \sqrt{b_7^2 Sb_3^2 + b_3^2 Sb_7^2} \dots \dots \dots (10)$$

$$Sb_3b_7 = \sqrt{(0,542)^2(0,000)^2 + (-0,181)^2(0,013)^2}$$

$$Sb_3b_7 = 0,00235$$

Berdasarkan perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka harus menghitung nilai z hitung (uji t-hitung) dari koefisien Sb_3b_7 dengan rumus yaitu:

$$z = \frac{b_3b_7}{Sb_3b_7} \dots \dots \dots (11)$$

$$z = -41,746$$

Oleh karena z hitung sebesar $-41,746 < 1,64$, hal ini berarti secara tidak langsung investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali atau dapat dikatakan pula bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening dalam pengaruh investasi pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan investasi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar merupakan investasi daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh investasi daerah namun peran investasi swasta pun sangat tinggi. Investasi di Provinsi Bali hanya berpusat pada daerah tertentu

saja dan tidak adanya pemerataan setiap daerah di Provinsi Bali sehingga hanya daerah tertentu saja yang dapat mengembangkan perekonomiannya.

SIMPULAN DAN SARAN

IPM berpengaruh langsung dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali karena tingginya angka IPM menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara umum suatu daerah, sedangkan biaya infrastruktur dan investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, dimana peningkatan biaya infrastruktur dan investasi setiap tahunnya tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung dan signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali, sedangkan IPM serta investasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. IPM serta biaya infrastruktur memiliki pengaruh pada ketimpangan distribusi pendapatan secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. IPM serta biaya infrastruktur yang semakin baik setiap tahunnya serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik akan memberikan peningkatan kapasitas perekonomian daerah dimana sektor riil suatu daerah akan bergerak baik dalam bidang infrastruktur maupun sumber daya manusia dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah, pertama pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pemerataan pengembangan infrastruktur di setiap daerah serta lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga potensi yang

dimiliki oleh suatu daerah dapat digali dan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Kedua, pemerintah diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali agar ketimpangan distribusi pendapatannya dapat dicegah, baik dari segi kualitas SDM, pengalokasian pengeluaran daerah dalam bidang infrastruktur yang tepat serta pemerataan investasi di setiap daerah.

REFERENSI

- Abdul, Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ali, Hasnah, Er, A.C., Ahmad, A.R., Lyndon, N., Ahmad, Sanep. 2013. An Analysis of the Impact of Foreign Investment on Regional Disparities: A Case of Malaysia. *Asian Sosial Science*, 9(14).
- Amrillah dan Mahaendra Yasa. 2013. Analisis Disparitas Pendapatan Per Kapita Antar Kecamatan dan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di kabupaten Karangasem. *E-Jurnal EP Unud*, 2(4): 181-189.
- Antonescu, Daniela. 2010. The Analysis of Regional Disparities in Romania with Gini/Struck Coefficients of Concentration. *Scientific Researcher*, 2(8).
- Anwar, Muhammad S., Sampath, R.K. 1999. Investment and Economic Growth. *Department of Agricultural and Resource Economics*.
- Arshanti, Novita, dan Wirathi. 2015. Pengaruh Investasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(5): 513-524.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi ke 1. Yogyakarta: BPF.
- , 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Awandari, Putri, dan Indrajaya. 2015. Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal EP Unud*, 5(12): 1435-1462.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2008 -- 2015. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2016. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- Bappeda Provinsi Bali. 2008 – 2015. *Koefisien Gini Provinsi Bali*. Bali: Bappeda.
- Barimbing, Yesika, dan Karmini. 2015. Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(5): 434-450.
- Barro, Robert J. 1999. Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of Economic Growth*. 5(5).
- Basu, Saswati, Basu, Parikshit. 2005. Regional Disparity in Australia: Analysis of Gender Development Index. *International Review Business Research Papers*. 1(2): 56-66.
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Cetakan ke 7. Yogyakarta: BPFE.
- Bogumil, Piotr. 2009. Regional Disparities in Poland. *European Commision*. 6(4).
- Breau, Sebastien, dan Richard Saillant. 2016. Regional Income Disparities in Canada: Exploring the Geographical Dimensions of an Old Debate. *Journal Regional Studies, Regional Science, Vol. 3*: 463-481.
- Cahyani, Ratih, dan Darsana. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 1996-2013. *E-Jurnal EP Unud*, 5(5): 557-577.
- Caska dan R.M, Riadi. 2008. Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Riau. *Jurnal Industri dan Perkotaan, Volume 12 Nomor 21*.
- Cherodian, Rowan, Thirlwall, A.P.. 2013. Regional Disparities in Per Capita Income in India: Convergence or Divergence?. *School of Economics Discussion Papers*.
- Gama, Ayu Savitri. 2009. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*. 2 (1), hal: 38-48. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur...[Diah Pradnyadewi, Ida Bagus Purbadharmaja]

Gebbert, Kurt, Michael Happich dan Andreas Stephan. 2005. Regional Disparities in The European Union: Convergence and Agglomeration. *German Institute of Economic Research*. DIW Berlin.

Hakim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia.

Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.

Hariwan, Peggy, dan Ayu Swaningrum. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *JEKT*, 8(1). 71-81.

Hidayat, Haris. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2012. *Eprints undip*.

Irawan, Andi. 2015. Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1): 148-149.

Jhingan, M.L. 1992. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan D. Guritno. Jakarta: Rajawali.

Kaur, Manjinder dan Singh Lakhwinder. 2016. Knowledge in the Economic Growth of Developing Economies. *African Journal of Science, Technology, Innovation, and Development*, 8(2): 205-212.

----- . 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Cetakan Kesembilan. Diterjemahkan oleh D. Guritno. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahesha, Dr.D., Shivalingappa, Dr. B.N. 2011. Regional Disparities of Human Resource Development in South India. *E-International Scientific Research Journal*, 3(4).

Makmur, T., Safrida, Jayanti, Karisma. 2011. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Desa di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Agrisepe*, 12(1).

Mankiw, Gregory. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.

- Maryaningsih, Novi, Hermansyah, Oki, Savitri Myrnawati. 2014. Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *BEMP*, 17(1).
- Nanda, Agung Widjanarko Eka. 2013. Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Kabupaten Banjarnegara Tahun 1990-2010. *Eprints ums*.
- Noorbakhsh, Farhad. 1998. The Human Development Index: Some Technical Issues and Alternative Indices. *Journal of International Development J. Int. Dev.* 10, 589-605.
- Nungki, Sesilia. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2006 – 2009. *UNS-F. Ekonomi-Jur Ekonomi Pembangunan*.
- Nurhuda, Rama, dkk. 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2011. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 110-119.
- Olfie, Benu, Suzana, Kapantow, Gene H.M. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara. *Ejournal Unsrat*, 6(17).
- Paramita, Diah, dan Purbadharmaja. 2015. Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(10): 1194-1218.
- Pauzi, Ahmad, dan Budiana. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 5(6): 668-691.
- Poddar, Tulika, Chotia, Varun, NVM Rao, Dr.. 2014. An Empirical Study Analyzing The Relationship Between Human Development and Economic Growth: Evidences from Six Major Economies. *International Journal of Social Economics (Emerald Publications)*.
- Putri, Valentiana, dan Suardhika Nata. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal EP Unud*, 4(1): 41-49.
- Ranis, Gustav. 2004. Human Development and Economic Growth. *Yale University Economic Growth Center Discussion Paper No. 887*.
- Sahoo, Pravakar, Dash, Ranjan Kumar, Nataraj, Geethanjali. 2010. Infrastructure Development and Economic Growth in China. *Institute of Developing Economics, JETRO*.

- Sari, Dita Tristyana. 2015. Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Kredit Perbankan, Jumlah Penduduk, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*.
- Silva, Rita, Lopes, dan Alexandra Ferreira. 2012. A Regional Human Development Index for Portugal. *CEFAGE-UE Working Paper*.
- Sjafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Prisma, No. 3*. Jakarta.
- , 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soenandar, Esri S., 2005. Government Policy in Solving Uneven Regional Development between West and East Indonesia: Case Study on KAPET. *HUSCAP, Vol 34*.
- Sojoodi, Sakineh, Zonuzi, Fakhri Mohseni, Nia, Nasim Mehin Aslani. 2012. The Role of Infrastructure in Promoting Economic Growth in Iran. *Iranian Economic Review, 16(32)*.
- Steven Wanimbo, Jimmy dan Jamli Ahmad. 2010. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (Belanja Modal) dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua, 2008 – 2011. *ETD Gadjah Mada University*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, 2011. Struktur Ekonomi Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Universitas Terbuka*.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ke 3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumadiasa, Tisnawati dan Wirathi. 2016. Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2014. *E-Jurnal EP Unud, 5(7): 925-947*.
- Suryahadi, Asep, Gracia Hadiwijaya, dan Sudarno Sumarto. 2012. Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia Before and After the Asian Financial Crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 48(2): 209-227*.

- Susanto, Aris Budi, dan Lucky Rachmawati. 2012. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Suwandika, Eka, dan Mahaendra Yasa. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(7): 794-810.
- Suyana Utama, Made. 2007. *Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Tukan, Marcus, Tri Achmadi, dan Sjarief Widjaja. 2015. Seaport Dimensional Analysis Towards Economic Growth In Archipelagic Regions. *IJTech*, 6(3).
- Wahyuni, Putri dkk. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(8).
- Wirawan, Nata. 2002. *Cara Mudah Memahami Statistik 2 (Statistik Inferensia) Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Kedua*. Denpasar: Keramat Emas.
- Yasa, Oka, dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *JEKT*, 8(1): 63-70.
- Yeniwati. 2013. Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 2 (3), hal. 1-21. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Yuliani, Tutik. 2015. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 8(1).